

Daftar Isi:

Food Banks 1

Tanggap Darurat Covid-19 untuk Pertanian di Jepang 2-5



5-2-9 Higashi Gotanda

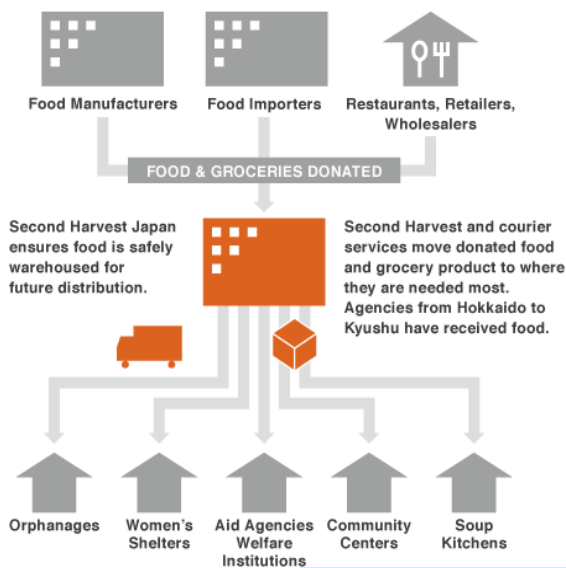
Phone: (81) 3-3447 - 6364
Fax: (81) 3-3447 - 6365
E-mail: agriculture@kbritokyo.jp



Food Banks

Dilatarbelakangi kenyataan bahwa terdapat kelompok yang mengalami kelebihan pangan dan kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, sebuah organisasi nirlaba berdiri pada tahun 2000 dengan nama "Second Harvest Japan". Dengan empat program utama, yaitu Harvest Kitchen, Harvest Pantry, Food Banking, dan Advocacy & Development, "Second Harvest Japan" ini berupaya mengumpulkan kelebihan pangan tahunan di Jepang yang rata-rata mencapai 17,88 juta ton/tahun untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui sistem bank pangan (Food Banks) dan promosi sistem dapur makanan. Saat ini tingkat swasembada pangan di Jepang mencapai 39 persen dan sebanyak 20 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya, ada satu orang miskin dari setiap enam orang di Jepang. Kehilangan pangan di Jepang hampir setara dengan total jumlah bantuan pangan yang didistribusikan di seluruh dunia.

Second Harvest Japan establishes and develops partnerships with manufacturers, wholesalers, importers and restaurants and encourages them to donate excess food or grocery items.



Harvest Kitchen berupa kegiatan untuk membagikan makanan yang baru saja dimasak (panas) pada setiap hari Sabtu di Ueno Park. Harvest Pantry adalah kegiatan mendistribusikan bahan pangan darurat kepada keluarga pra sejahtera. Food Banking adalah kegiatan menerima donasi pangan dari pengolah, importir, pengecer, dan petani untuk didistribusikan kepada lembaga kesejahteraan yang menyediakan pangan bagi masyarakat rawan pangan. Advocacy and Development adalah kegiatan tahunan untuk mempromosikan keberadaan, peran dan manfaat Food Banks di seluruh wilayah Jepang.

Food Banks menerima donasi pangan dari pengolah, pengecer, petani dan perseorangan untuk selanjutnya didistribusikan kepada yang membutuhkan, misalnya lembaga kesejahteraan masyarakat, panti asuhan, suka perempuan, tuna wisma, dan lain-lain. Pangan yang dikumpulkan merupakan pangan yang masih aman dan dapat dimakan karena beberapa alasan, yaitu (1) Masalah pengemasan seperti kaleng penyok atau kotak pengiriman rusak, (2) Kesalahan label tanggal kedaluwarsa dan/atau kesalahan dalam informasi label yang ditetapkan Food Labelling Law, (3) Produk musiman dengan edisi terbatas, (4) Kelebihan inventaris atau persediaan setelah transaksi penjualan atau kampanye, (5) Produk yang tanggal kadaluarsanya tinggal satu bulan, sehingga tidak dapat dijual, (6) Produk yang dihentikan distribusinya, (7) Kelebihan produksi, (8) Produk yang cacat produksi atau tidak memenuhi 30% dari ketetapan di dalam regulasi, (9) Persediaan makanan darurat yang belum kadaluarsa, dan (10) Contoh produk untuk pameran dan acara khusus.

Keberadaan Food Banks ini tidak saja menguntungkan bagi donor dan penerima, melainkan juga lembaga Pemerintah. Bagi lembaga kesejahteraan, Food Banks menurunkan biaya distribusi pangan rata-rata hingga 40 persen, sehingga terjadi penghematan anggaran dan memberi peluang untuk menyediakan produk baru yang hanya tersedia secara musiman dan berharga premium karena bernutrisi tinggi. Bagi donor, Food Banks membantu meminimalisir biaya pembuangan pangan, di mana Jepang memberlakukan biaya pembuangan pangan ¥100/kg. Dengan berdonasi, tidak saja menghemat biaya melainkan juga mendukung pelestarian lingkungan akibat pemanasan global yang timbul dari pangan yang terbuang. Lebih jauh, perusahaan yang melakukan donasi dalam bentuk Corporate Social Responsibility akan memperoleh dampak positif, yaitu "company branding" secara gratis, sehingga semakin banyak anggaran yang dapat dihemat. Bagi Pemerintah, kegiatan Food Banks sejalan dengan target penurunan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pangan yang terbuang dan sangat membantu dalam meningkatkan ketahanan pangan.

| OK | Not OK |
|---|---|
| •Canned food | •Bento(lunch boxes) |
| •Agricultural products | •Fast food: sandwiches, onigiri(rice balls), hamburgers, etc. |
| •Emergency supplies | •Prepared food such as leftovers from banquets and parties Expired food |
| •Rice and other grains | •Food without any expiration date on the package |
| •Bread and pastries | •Handmade / homemade food |
| •Temperature controlled (frozen /chilled) | |

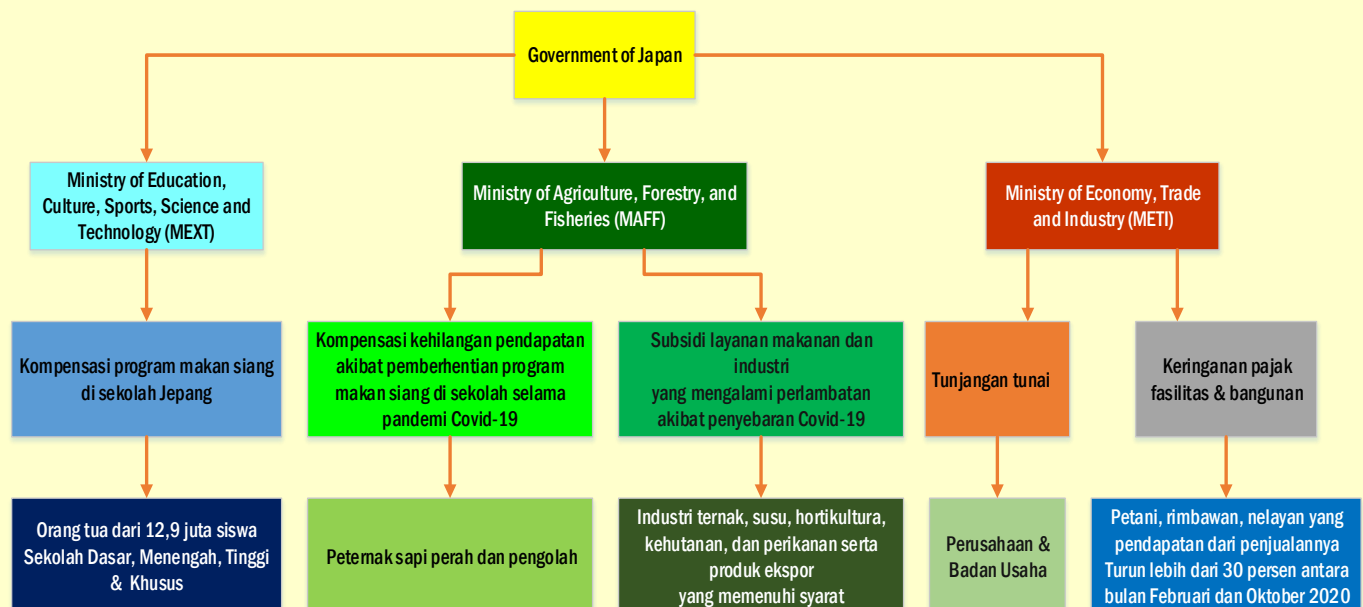
Tanggap Darurat Covid-19 untuk Pertanian Jepang

Sejak dilanda pandemi Covid 19, Pemerintah Jepang menunjukkan perhatian serius terhadap berbagai sektor yang terdampak. Melalui dana darurat Covid-19 tahap pertama, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) menerima anggaran untuk memberi bantuan kepada 12,9 juta siswa sekolah dasar, menengah, tinggi dan khusus guna mencegah penyebaran Covid-19. Bantuan tersebut ditujukan untuk mengkompensasi program makan siang di sekolah Jepang yang akan diberikan kepada orang tua siswa.

Dana darurat Covid-19 juga dialokasikan melalui Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries (MAFF) untuk memberi kompensasi kepada petani, peternak sapi perah dan pengolah makanan yang mengalami kehilangan pendapatan akibat pemberhentian program makan siang di sekolah selama pandemi Covid-19. Petani dan produsen makanan yang memasok program makan siang di sekolah dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima pembayaran dukungan dari MEXT direkomendasikan untuk mengalihkan pasokannya ke bank makanan (Food Banks) sebagai sumbangan atau untuk diproses menjadi pupuk dan pakan.

Selain memberikan pembayaran kepada pemasok makanan pada program makan siang di sekolah, Pemerintah Jepang juga akan memberikan bantuan biaya terkait dengan pembelian, penyimpanan, dan pengiriman kepada pembeli baru hingga dimulai kembali program makan siang di sekolah. Para pemasok makanan untuk program makan siang di sekolah termasuk produsen berhak menerima pembayaran bantuan untuk membeli peralatan dan mesin guna melatih karyawan tentang cara meningkatkan kondisi sanitasi pangan.

Petani, rimbawan, dan nelayan Jepang juga berhak menerima tunjangan tunai dari Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) guna menopang usaha yang mengalami kerugian karena terkena dampak Covid-19. Perusahaan yang memenuhi syarat akan menerima tunjangan hingga maksimal ¥2 juta (US\$18.692) dan masing-masing badan usaha berhak atas tunjangan maksimal ¥1 juta (US\$9.345). Selain itu petani, rimbawan dan nelayan Jepang yang pendapatan dari hasil penjualannya menurun lebih dari 30 persen antara bulan Februari dan Oktober 2020 akan memperoleh keringanan pajak sebagai bagian dari Japan's Covid-19 Emergency Economic Package (Paket Ekonomi Darurat Covid-19). Petani juga berhak untuk berpartisipasi dalam program insentif pajak properti yang telah diperluas dan mencakup fasilitas dan bangunan.



Alokasi Dana Tanggap Darurat Pandemi Covid-19 untuk Pertanian di Jepang

Diantara masyarakat yang berada di wilayah kerja MAFF, yaitu petani, peternak, nelayan, dan rimbawan, yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 adalah peternak sapi wagyu dan sapi perah. Jauh sebelum pandemi Covid-19 menerpa, peternak sapi wagyu mengalami penurunan permintaan. Namun, dengan pemberhentian program makan siang di sekolah selama pandemi Covid-19, peternak sapi perah yang langsung terdampak. Oleh karena itu, bantuan pertama diberikan kepada peternak sapi perah yang mengalami penurunan permintaan susu segar untuk konsumsi akibat penutupan sekolah di seluruh wilayah Jepang. Program menu makanan dengan menyediakan susu segar bagi siswa sekolah berkontribusi 10% terhadap total konsumsi susu di Jepang. Pemerintah Jepang mengalokasikan anggaran subsidi harga susu segar akibat kelebihan pasokan guna diolah lebih lanjut menjadi susu bubuk rendah lemak dan selanjutnya digunakan sebagai bahan pakan ternak.

Beef Marukin

Sejak tahun 2019, harga daging sapi wagyu terus menurun, sehingga memicu peningkatan pembayaran subsidi di bawah Beef Livestock Stabilization Program (Beef Marukin). Selama ini, peternak sapi wagyu diwajibkan untuk berkontribusi dana pada Beef Marukin sebesar 25 persen. Japan's Agriculture and Livestock Industries Corporation (ALIC) atau perusahaan industri dan perdagangan ternak Jepang menerima anggaran tambahan subsidi dari Pemerintah Jepang untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 guna dialokasikan untuk merangsang kembali konsumsi daging sapi wagyu dan memberi dukungan kepada peternak sapi wagyu dan peternak sapi perah serta perusahaan pengolah jangat/kulit dan peternakan yang terkena dampak langsung Covid-19.

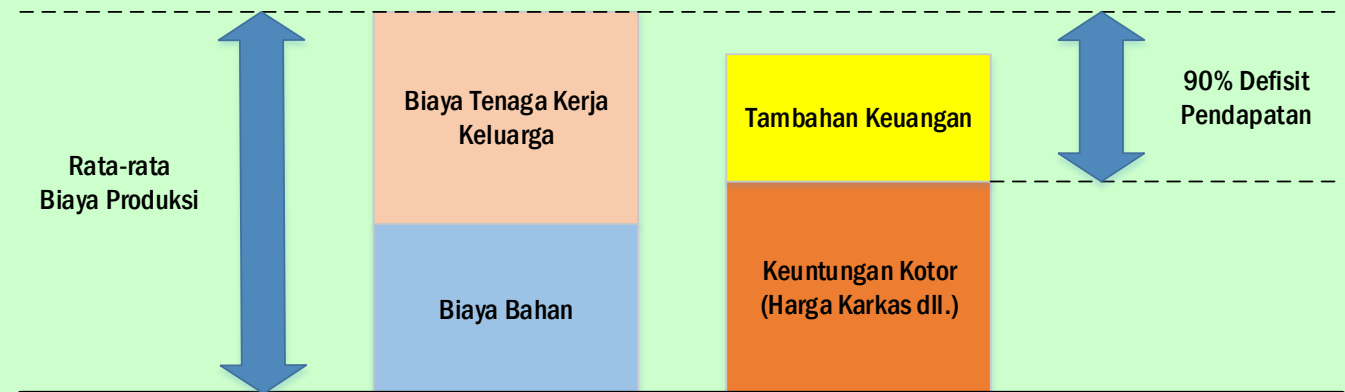
Peternak sapi wagyu yang berhak menerima subsidi tersebut harus memenuhi kriteria, yaitu pertama mempunyai fasilitas perbaikan seperti pengendalian suhu dan hama penyakit. Kedua, mempunyai konsultan analisis manajemen peternakan. Ketiga, melakukan pencegahan penyakit ternak sapi. Keempat, melakukan perbaikan nutrisi menggunakan pakan kaya vitamin. Pembayaran subsidi bervariasi menurut jenis dan derajat perubahan harga pedet wagyu di pasar yang menjadi pemicunya (price trigger) dan ditetapkan berdasarkan harga rata-rata nasional per bulan.

| Jenis | Pembayaran Subsidi | |
|------------------|--------------------|--------------|
| | ¥10.000/ekor | ¥30.000/ekor |
| Wagyu bulu hitam | ¥600.000 | ¥570.000 |
| Persilangan | ¥300.000 | ¥290.000 |
| Holstein | ¥180.000 | ¥170.000 |



Untuk mendukung penjualan dan penyimpanan daging wagyu, target penerima subsidi adalah pasar pedagang besar yang mempunyai fasilitas penyimpanan daging wagyu. Pedagang harus menyerahkan proposal promosi kepada ALIC guna memperoleh persetujuan untuk diberi subsidi. Daging wagyu yang menjadi target program ini adalah, pertama berasal dari empat jenis sapi wagyu utama (bulu hitam, bulu coklat, bertanduk pendek, bertanduk lengkung) atau wagyu persilangan. Kedua, menghasilkan daging wagyu dalam bentuk potongan atau telah diolah lebih lanjut (iris daging tipis yang dapat dilacak dalam sistem identifikasi ternak) serta dikemas pada atau sebelum 6 April 2020 dan dipotong lalu dikemas pada atau sebelum 7 April 2020. Produk yang diproses setelah 7 April 2020 tidak berhak diajukan untuk memperoleh subsidi. Ketiga, memproses daging wagyu dengan dibekukan lalu disimpan di dalam fasilitas yang dirancang untuk penyimpanan selama satu bulan atau lebih. Keempat, akan dijual dalam periode satu tahun sejak tanggal pengemasan sesuai rencana promosi dan pemasaran yang diusulkan dalam proposal. Selain subsidi di harga daging wagyu, di bawah Beef Marukin Pemerintah Jepang juga mengalokasikan subsidi pendapatan untuk peternak sapi wagyu guna mengurangi beban peternak akibat biaya produksi yang melampaui pendapatan. Besaran subsidi yang diberikan adalah 75 persen berasal dari Pemerintah dan 25 persen dari produsen yang terakumulasi di dalam kontribusi dana Beef Marukin, sehingga secara total subsidi akan menutup 90 persen perbedaan antara biaya produksi dan pendapatan peternak.

Besaran subsidi yang diberikan adalah 75 persen berasal dari Pemerintah dan 25 persen dari produsen yang terakumulasi di dalam kontribusi dana Beef Marukin, sehingga secara total subsidi akan menutup 90 persen perbedaan antara biaya produksi dan pendapatan peternak.



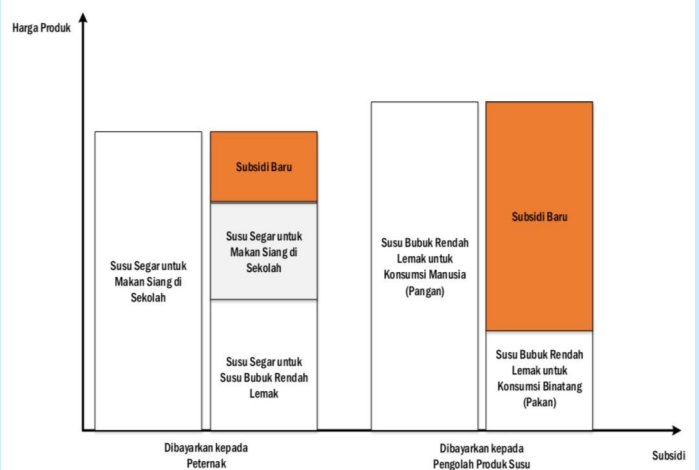
Kontribusi Subsidi Pemerintah pada Pendapatan Peternak Sapi di Jepang

Susu & Produk Susu

Pembayaran subsidi bagi peternak sapi perah (produsen susu segar) untuk mengarahkan penggunaan kelebihan pasokan susu segar akibat pandemi Covid-19 guna diproses lebih lanjut menjadi produk susu tertentu serta memfasilitasi sumbangan produk susu ke bank makanan (Food Banks). Secara garis besar, subsidi Pemerintah Jepang pada industri susu dan produk susu terbagi dalam dua program, yaitu kepada Pengolah Produk Susu dan Donasi Susu yang dibedakan dalam sub program, target, dan besaran subsidi.

| Subsidi Pengolah Produk Susu | | |
|--|---|------------------------------|
| Sub Program | Target | Subsidi |
| 1. Pembayaran susu segar | Pengolah produk susu | Susu segar ¥50/Kg (maksimal) |
| 2. Penyimpanan dan pendistribusian produk olahan | Biaya penyimpanan dan distribusi (maksimal periode penyimpanan 6 bulan) | Keju/mentega ¥3/Kg per bulan |
| | | Susu bubuk ¥2/Kg per bulan |
| 3. Rencana Pengembangan | Biaya lain-lain | Jumlahnya tetap |

| Subsidi Donasi Susu | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| Sub Program | Target | Subsidi |
| 1. Subsidi donasi | Biaya produk donasi (Tidak termasuk transportasi) | Sebesar harga pasar produk donasi |
| 2. Rencana Pengembangan | Biaya lain-lain | Jumlahnya tetap |



Besaran Subsidi untuk Susu dan Produk Susu

Ilustrasi Besaran Subsidi untuk Susu dan Produk Susu

Distribusi dan Perdagangan

Selain peternak, petani, nelayan, dan rimbawan cukup tertolong dengan terjadinya peningkatan belanja masyarakat untuk bahan pangan selama diberlakukan masa darurat Covid-19 di mana permintaan untuk tinggal di rumah selama April - Mei 2020 telah meningkatkan penjualan bahan pangan di supermarket yang mengalami peningkatan tajam dibandingkan penjualan selama Januari - Maret 2020. Bahan pangan yang diserbu konsumen antara lain bahan kue, pasta, dan peralatan makan yang mudah disiapkan. Namun demikian, penjualan buah-buahan impor musiman mengalami penurunan dan nyaris terhenti karena umumnya didatangkan dengan kargo udara bersamaan dengan bahan makanan laut segar kualitas premium untuk memenuhi permintaan hotel dan restoran.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan makanan di restoran dan hotel di Jepang menurun secara drastis karena pariwisata berhenti dan acara-acara publik turun. Di lain pihak penjualan eceran di supermarket melonjak karena sekolah-sekolah tutup setelah Pemerintah Jepang secara resmi meminta masyarakat untuk tinggal di rumah serta bekerja dan belajar dari rumah. Pergeseran belanja konsumen telah berdampak negatif terhadap importir, pedagang grosir, dan distributor dari skala kecil hingga menengah yang umumnya memasak restoran, hotel, supermarket, sekolah, serta kafetaria di tempat kerja. Pengiriman barang secara global mengalami keterlambatan karena berkurangnya kapasitas kargo udara dan kenaikan harga kargo, sehingga telah berdampak pada intensitas kedatangan produk impor.

Sebagai bagian dari paket ekonomi darurat Covid-19 oleh Pemerintah Jepang, MAFF menerima anggaran tambahan untuk mensubsidi layanan makanan dan industri yang mengalami perlambatan akibat penyebaran Covid-19. Layanan makanan tersebut antara lain adalah industri ternak, susu, hortikultura, kehutanan, dan perikanan serta produk ekspor yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi melalui anggaran tambahan. Pada 21 April 2020, Pemerintah Jepang menyampaikan notifikasi kepada World Trade Organization (WTO) melalui G/SPS/N/JPN/755 tentang tindakan sementara untuk menerima salinan sertifikat ekspor untuk hewan, tumbuhan, dan produk dari hewan dan tumbuhan guna memfasilitasi perdagangan selama pandemi Covid-19. Salinan sertifikat harus diterbitkan oleh otoritas kompeten dari negara pengekspor dan dapat diverifikasi melalui situs dan sistem yang resmi. Indonesia pun turut memanfaatkan fasilitas pemberlakuan sementara salinan sertifikat dan penelusuran keaslian sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Jepang dengan menyampaikan alamat telusur sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian di <https://ppkonline.karantina.pertanian.go.id/checkcert/>

Labelling

Selain pemberian subsidi, Pemerintah Jepang melalui Japan's Consumer Affairs Agency (Badan Urusan Konsumen Jepang) menangguk sementara pemantauan ketat terhadap informasi pelabelan makanan yang tidak kritis dan diproduksi di pasar domestik untuk memperlancar distribusi dan pemasaran pangan melalui rantai pasokan yang ada, sehingga tidak terdampak lebih jauh oleh pandemi Covid-19. Penanggukan tidak berlaku untuk produk impor, sehingga makanan impor harus tetap mematuhi Food Labeling Act (Undang-Undang Pelabelan Makanan).

Tenaga Kerja



Selain terdampak pada distribusi akibat pemberhentian program makan siang di sekolah Jepang, sektor pertanian Jepang menghadapi masalah serius dalam ketenagakerjaan. Kondisi bahwa tenaga kerja pertanian di Jepang terus menurun selama beberapa dekade, maka petani dan pemilik lahan pertanian semakin sulit memperoleh alternatif tenaga kerja, termasuk dari luar negeri. Dalam 10 tahun terakhir, persentase pekerja pertanian asing sebagai bagian dari total populasi pertanian telah meningkat empat kali lipat dari 0,5 persen menjadi dua persen. Sebagian besar pekerja ini mendapatkan pekerjaan melalui Technical Intern Training Program yang dibatasi hingga lima tahun. Meskipun tenaga kerja asing masih menyumbang sebagian kecil dari total tenaga kerja pertanian, ketergantungan Jepang terhadap

tenaga kerja asing cenderung meningkat dan semakin tampak ketika Pemerintah Jepang membatalkan kedatangan tenaga kerja asing untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. Guna menanggulangi permasalahan tenaga kerja tersebut, Pemerintah Jepang memberlakukan visa terpisah bagi tenaga kerja asing dari sektor mana pun untuk bekerja di sektor pertanian selama 1 (satu) tahun sebagai “special activities”.

Setiap tahun Jepang menerima sekitar 24 ribu pekerja melalui kerjasama Technical Intern Training Program dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2020, sebanyak 17 ribu pekerja untuk sektor pertanian batal tiba ke Jepang sebagai dampak tindakan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19. Mengantisipasi kenaikan permintaan peserta Technical Intern Training Program, Atase Pertanian bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Pertanian melakukan sosialisasi visa tenaga kerja berketerampilan khusus untuk sektor pertanian (Tokutei ginou) kepada calon magang dan alumni magang yang tergabung di dalam Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA).

Kredit

Perusahaan Jasa Keuangan milik Pemerintah Jepang juga telah melonggarkan pembayaran pinjaman bagi petani, rimbawan, dan nelayan yang terkena dampak Covid-19. Bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 berhak atas pinjaman tanpa agunan dan bunga selama lima tahun pertama serta batas nilai pinjaman hingga dua kali lipat menjadi ¥12 juta.



Berbagai program tanggap darurat Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Jepang dalam kaitannya dengan sektor pertanian tampak terintegrasi dari hulu hingga hilir. Mulai dari aspek produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran, serta pembiayaan. Subsidi yang dialokasikan ditentukan melalui prosedur baku berdasarkan persyaratan kepada petani/peternak, rimbawan, dan nelayan maupun pengolah produk pertanian/peternakan, kehutanan dan perikanan. Efektivitas subsidi tampak nyata dengan banyaknya donasi pangan yang masuk dan dikelola oleh Food Banks.

Selama berlangsung pandemi Covid-19 di Jepang, tidak terjadi kelangkaan bahan pangan di gerai penjualan, mulai dari mini market hingga swalayan modern serta tidak terjadi kenaikan harga penjualan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa nyaman dan tetap mematuhi permintaan Pemerintah Jepang untuk tinggal di rumah selama diberlakukan masa darurat Covid-19 hingga seluruh wilayah Jepang dibuka kembali dalam era New-Normal pada tanggal 25 Mei 2020.

Tokyo, 2- 30 Mei 2020.

